

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang, dimana pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan adalah merupakan rangkaian kegiatan yang terencana menuju kearah kehidupan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Untuk melaksanakan pembangunan tentunya memerlukan modal yang cukup besar, sementara kemampuan pemerintah dalam penyediaan modal sangat terbatas, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan- kebijakan dalam usaha untuk memperoleh dana yang lebih besar guna membiayai pembangunan. Usaha pengeralahan sumber dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yaitu ekspor barang dan jasa ke luar negeri, ataupun penerimaan pemerintah melalui instrumen pajak.

Di Indonesia, untuk membiayai pembangunan nasional yang mencakup investasi domestik, sumber dananya dapat bersumber dari penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi., Secara umum, usaha pengeralahan modal dari masyarakat dapat berupa pengeralahan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pengklasifikasian ini didasarkan pada sumber modal yang dapat digunakan dalam pembangunan. Pengeralahan modal yang bersumber dari dalam negeri, yaitu yang berasal dari simpanan masyarakat, pengusaha maupun dari pemerintah dan modal yang berasal dari luar negeri yaitu melalui pinjaman resmi

pemerintah kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), World Bank, maupun pinjaman resmi bilateral dan multilateral, juga melalui foreign direct investment (FDI). Masih terbatasnya sektor modern dan belum berfungsinya secara efektif dan efisien institusi keuangan yang disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih tradisional menyebabkan pengerahan dana dari masyarakat mengalami kesulitan.

Indonesia terbuka secara resmi dan efektif terhadap penanaman modal sejak tahun 1967 ketika pemerintah orde baru memberlakukan undang-undang Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Selanjutnya, Indonesia mengalami periode pasang surut dalam penerimaan arus modal investasi, kebijakan devaluasi rupiah tahun 1983 mempengaruhi tingkat pertumbuhan investasi. Tahun 1991 ketika terjadi gebrakan Sumarlin II (*tight money policy*) yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk mengontrol tingkat inflasi, menjaga defisit neraca transaksi berjalan agar tidak melebihi batas yang masih bisa diterima, mengawasi uang luar negeri, serta menjaga performance Indonesia dimata investor.

Sampai dengan tahun 1991 jumlah modal asing yang masuk ke Indonesia mencapai 8.778 juta dolar Amerika untuk sebanyak 376 proyek. Angka tersebut terus meningkat dan menjelang akhir tahun 1995 telah menjadi 40.627,9 juta dolar untuk sebanyak 618 proyek , artinya selama 4 tahun arus modal asing (PMA) yang masuk ke Indonesia mengalami kenaikan menjadi 5 kali lipat. Sementara itu untuk janka waktu yang sama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hanya meningkat sekitar 25 persen dari nilai investasi sebesar Rp. 41.077,0 miliar

menjadi Rp. 51.885,6 miliar (Basuki & Sulisty: 1997 : 51-65). Dengan demikian dapat dilihat gambarannya, bahwa selama lima tahun tersebut Indonesia menarik bagi penanaman modal asing, sedangkan penanaman modal dalam negeri justru menunjukkan perkembangan yang lebih lambat.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang kemudian menjadi krisis multidimensi berdampak kondisi Indonesia secara umum tidak hanya terhadap sektor ekonomi saja. Keterpurukan Indonesia dalam krisis ekonomi yang berlarut-larut, salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk mengembalikan tingkat investasi seperti sebelum krisis.

Tabel 1.1. Perkembangan PMDN,PMA di Indonesia Periode 2000-2009.

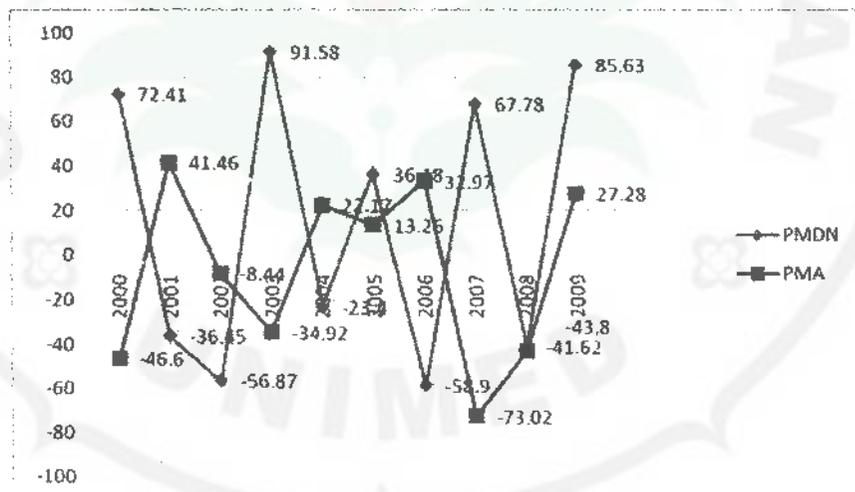
Tahun	PMDN			PMA		
	Proyek	Nilai (miliar Rp)	%	Proyek	Nilai (juta US\$)	%
1997	718	119872.9	19.02	790	33832.5	13.03
2000	355	92327.7	72.41	1524	15420	-46.60
2001	249	58672.9	-36.45	1317	9027.5	41.46
2002	184	25307.6	-56.87	1141	9789.1	-8.44
2003	181	48484.8	91.58	1024	13207.2	-34.92
2004	178	37140.4	-23.40	1190	10279.8	22.17
2005	218	50577.4	36.18	908	8916.9	13.26
2006	164	20788.4	-58.90	867	5977.0	32.97
2007	159	34878.7	67.78	983	10341.4	-73.02
2008	239	20363.4	-41.62	1138	14871.4	-43.80
2009	248	37799.9	85.63	1221	10815.2	27.28

Sumber: BI,BPS.

Pada tahun 1997, nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) memuncak senilai Rp. 119872,9 miliar dengan jumlah proyek 718 unit. Namun

nilai PMDN terus merosot sejak posisi puncak tersebut. Tahun 2002 PMDN tinggal senilai Rp. 25307.6 miliar dengan 184 proyek. Pada tahun 2004 tercatat nilai PMDN terus merosot hingga Rp. 37140,4 miliar dengan 178 proyek. Sedangkan pada penanaman modal asing (PMA) tertinggi dicapai pada tahun 2008 yaitu sebesar 14871.4 Juta US\$ dan angka pertumbuhan terendah pada tahun 2000 yaitu sebesar 15420 juta US\$.

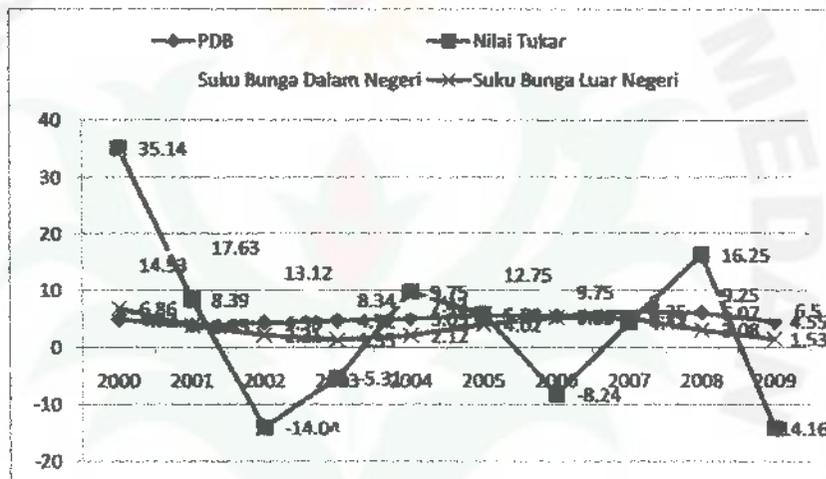
Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama periode 2000 sampai 2009 perkembangan investasi cenderung mengalami fluktuasi



Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan PMDN dan PMA Periode 2000-2009

Pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam tahun 2001 mengalami perlambatan. Produk Domestik Bruto (PDB) 2001 tumbuh sebesar 3,3% lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 4,9% (Gambar 1.2), hal ini terjadi tidak terlepas dari perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri yang kurang menguntungkan. Dari dalam negeri, perlambatan ini disebabkan masih

tingginya risiko dan ketidakpastian sehubungan dengan meningkatnya ketegangan sosial politik, serta lemahnya penegakan hukum menyebabkan menurunnya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan kegiatan produksi dan investasi yang pada akhirnya menghambat ekspansi ekonomi lebih lanjut.



Gambar 1.2. Perkembangan Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, Suku Bunga Dalam Negeri dan Suku Bunga Luar Negeri Tahun 2000-2009.

Dari luar negeri, perkembangan perekonomian dunia yang cenderung melambat sejak triwulan I-2001 dan kemudian menjadi lebih buruk pasca tragedi World Trade Centre (WTC) pada 11 September 2001, yang telah menyebabkan perekonomian negara-negara maju terganggu, diantaranya adalah negara-negara yang menjadi investor dan mitra dagang penting bagi Indonesia.

Dalam tahun 2001, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi yang sangat besar sekitar 8.39% , yaitu rata-rata Rp. 9.595 dalam tahun 2000 menjadi Rp. 10.400 per dollar dalam tahun 2001. Besarnya tekanan depresiasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya *country risk* sejalan dengan memburuknya

ketidakpastian kondisi sosial politik dalam negeri, nilai tukar rupiah secara riil menjadi semakin *undervalued* dan menimbulkan tekanan yang cukup besar terhadap laju inflasi.

Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi sangat tajam, inflasi yang tinggi, menurunnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, merupakan beberapa akibat dari krisis ekonomi tersebut. Lambat laun, dengan beberapa kali perubahan struktur politik dan penerapan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah, kondisi Indonesia menunjukkan perubahan yang lebih baik dan kondisi perekonomian yang stabil. Fluktuasi nilai tukar adalah sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Ketidaksatabilan nilai tukar ini mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang banyak mengimpor bahan baku industry mengalami dampak dari ketidakstabilan kurs ini, yang dapat dilihat dari melonjaknya biaya produksi sehingga menyebabkan harga barang-barang milik Indonesia mengalami peningkatan. Dengan melemahnya rupiah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan dilanda krisis ekonomi dan kepercayaan terhadap mata uang dalam negeri. Mengingat besarnya dampak dari fluktuasi kurs terhadap perkembangan investasi maka diperlukan suatu manajemen kurs yang baik, yang dapat menjadikan kurs stabil, fluktuasi dapat diprediksi dan perekonomian dapat berjalan dengan stabil.

Tingkat suku bunga yang tinggi, akan menyerap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika tingkat suku bunga dinaikkan, jumlah uang yang beredar berkurang karena orang lebih senang menabung daripada memutarakan uangnya pada sektor-sektor produktif. Sebaliknya jika tingkat suku bunga terlalu rendah

maka jumlah uang yang beredar dimasyarakat akan bertambah karena orang lebih suka memutarakan uang pada sektor-sektor produktif daripada menabung. Dalam hal ini tingkat suku bunga merupakan instrument konvensional untuk mengendalikan inflasi.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka dalam penyusunan tesis ini peneliti mengambil judul: “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto, nilai tukar rupiah, selisih suku bunga dalam negeri dengan suku bunga luar negeri terhadap investasi di Indonesia”.

1.3 Tujuan Penelitian

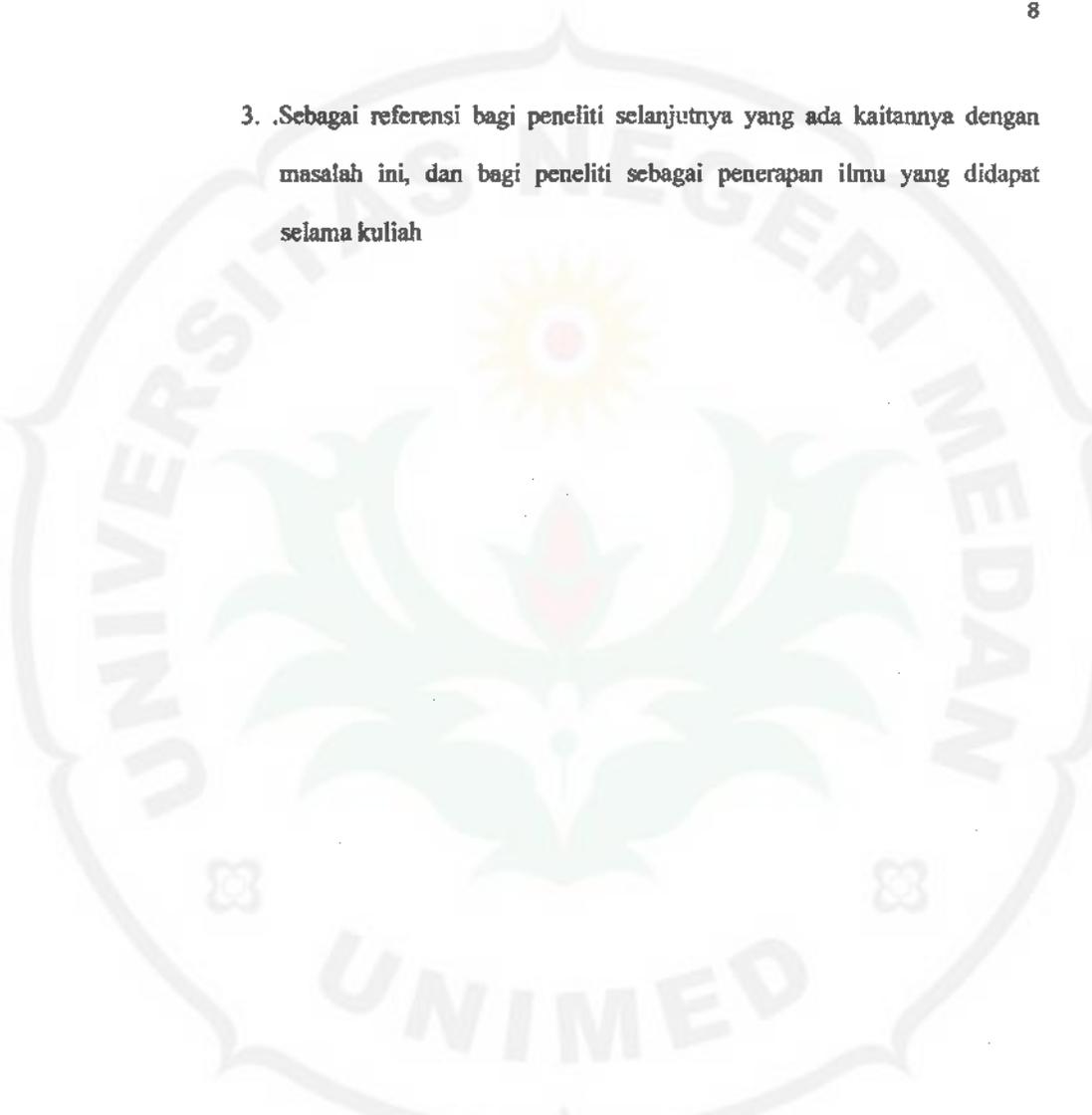
Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui pengaruh PDB, nilai tukar rupiah, selisih suku bunga dalam luar negeri dengan suku bunga luar negeri terhadap investasi di Indonesia”.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk berinvestasi.

3. .Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan bagi peneliti sebagai penerapan ilmu yang didapat selama kuliah



THE
Character Building
UNIVERSITY